



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi setiap Instansi Pemerintahan wajib untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan instansi masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan pelayanan prima di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak perlu dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
 10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak Kabupaten Solok selatan;

6. Kepala Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Solok Selatan ;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.
13. Standar Operasioanl Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
14. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan terdiri dari :

1. SOP prosedur pendisposisian surat-surat masuk
2. SOP prosedur pengagendaan surat-surat keluar
3. SOP prosedur penyusunan daftar urut kepangkatan (duk) dan nominatif pegawai negeri sipil
4. SOP prosedur penyusunan bezzeting pegawai negeri sipil
5. SOP prosedur penyusunan rekapitulasi absen pegawai
6. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (pns)
7. SOP prosedur pembuatan bahan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai negeri sipil
8. SOP prosedur pembuatan SKP dan prilaku kerja pegawai negeri sipil (pns)
9. SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pembagian tugas personil
10. SOP prosedur pembuatan surat permohonan pindah pegawai negeri sipil (pns)
11. SOP prosedur pembuatan bahan usulan perobahan status calon pegawai negeri sipil (cpns) menjadi pegawai negeri sipil (pns)
12. SOP prosedur pembuatan bahan usulan permintaan kartu pegawai (karpeg)
13. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu isteri (karis)
14. SOP prosedur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu suami (karsu)
15. SOP proaesdur pembuatan bahan surat usulan permintaan kartu tabungan ansuransi pegawai negeri sipil (taspen)
16. SOP prosedur pembuatan surat cuti pegawai negeri sipil (pns)
17. SOP prosedur pembuatan surat cuti melahirkan bagi

pegawai negeri sipil (pns)

18. SOP prosedur pembuatan surat izin menikah bagi pegawai negeri sipil (pns)
19. SOP prosedur pembuatan surat izin perceraian bagi pegawai negeri sipil (pns)
20. SOP prosedur pembuatan surat izin belajar bagi pegawai negeri sipil (pns)
21. SOP prosedur pembuatan surat tugas belajar bagi pegawai negeri sipil
22. SOP prosedur pembuatan surat perintah tugas (SPT)
23. SOP prosedur pembuatan telaahan staf
24. SOP prosedur penyediaan jasa komunikasi
25. SOP prosedur pembuatan daftar inventarisasi barang milik pemerintah
26. SOP prosedur penyediaan sumber daya air
27. SOP prosedur penyediaan alat tulis kantor (atk)
28. SOP prosedur penyediaan barang percetakan dan penggandaan
29. SOP prosedur penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
30. SOP prosedur penyediaan makan dan minum kegiatan kantor
31. SOP prosedur penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
32. SOP prosedur pembuatan surat keputusan kepala dinas tentang pejabat pengelola keuangan
33. SOP prosedur pembuatan amprah gaji
34. SOP prosedur pembuatan amprah gaji ke 13
35. SOP prosedur pembuatan amprah kekurangan gaji pegawai
36. SOP prosedur penyusunan rencana kerja anggaran (RKA)
37. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
38. SOP prosedur penyusunan dokumen rencana kerja (renja)
39. SOP prosedur penyusunan dokumen rencana strategis (renstra)
40. SOP prosedur penyusunan dokumen laporan analisa kinerja instansi pemerintah (lakip)
41. SOP prosedur penyusunan dokumen lkpj

42. SOP prosedur pembuatan dokumen spj keuangan
43. SOP prosedur pembuatan dokumen data keuangan
44. SOP prosedur pembuatan dokumen buku kas umum (bku)
45. SOP prosedur pembuatan dokumen laporan keuangan
46. SOP prosedur pembuatan dokumen catatan keuangan
47. SOP prosedur pembuatan dokumen administrasi keuangan
48. SOP prosedur pembuatan dokumen inventarisasi data keuangan
49. SOP prosedur penyusunan dokumen tapkin
50. SOP prosedur penyusunan dokumen lppd
51. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan, monitoring dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan dan analisis dampak kependudukan
52. SOP prosedur penyusunan dokumen pengkajian bahan perumusan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyusunan parameter penduduk dan kerjasama pendidikan, pengendalian dan analisis dampak lingkungan
53. SOP prosedur penyusunan dokumen pemberian wawasan dan orientasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kkbpk dan kader posyandu
54. SOP prosedur penyusunan dokumen faasilitasi dan pemberian kesempatan kepada kader kkbpk dan kader posyandu untuk berperan dalam program pengendalian penduduk
55. SOP prosedur penyusunan dokumen pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai institusi dan lembaga sosial masyarakat (lsm)
56. SOP prosedur penyusunan dokumen pemberian bantuan dan persiapan pelayanan pogrmm kbkr dan keluarga sejahtera
57. SOP prosedur penyusunan dokumen penggerakan institusi dalam forum pertemuan tingkat kecamatan, nagari dan jorong
58. SOP prosedur penyusunan dokumen penyediaan dukungan operasional ipkb dalam program kb nasional
59. SOP prosedur penyusunan dokumen pembinaan teknis ipkb dalam program kb nasional
60. SOP prosedur penyusunan dokumen penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan an pemberdayaan keluarga

61. SOP prosedur penyusunan dokumen penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
62. SOP prosedur penyusunan dokumen penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
63. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan kebijakan teknis operasional program kependudukan terpadu antara perkembangan penduduk dengan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan
64. SOP prosedur penyusunan dokumen penetapan sasaran bina keluarga lansia (blk)
65. SOP prosedur penyusunan dokumen persiapan, penyelenggaraan, bimbingan dan penyediaan fasilitasi kelompok bina keluarga lansia (blk)
66. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
67. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
68. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirusahaan dan manajemen usaha bagi keluarga sejahtera alasan ekonomi dalam kelompok uppks
69. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok uppks
70. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan uppks
71. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan kriteria pemberian sertifikasi kelayakan usaha, pengembangan kualitas produksi dan penetapan skim kredit bagi kelompok uppks
72. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga
73. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan

- penyerasian indikator keluarga sejahtera
74. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan kriteria pembinaan keluarga rentan
 75. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan penetapan syarat pengendalian dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan keterampilan
 76. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan penyusunan materi promosi keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga
 77. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
 78. SOP prosedur penyusunan dokumen rencana operasional kegiatan pengelolaan dan pengendalian keluarga berencana (KB)
 79. SOP prosedur penyusunan dokumen rumusan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat peduli KB dan KB pria
 80. SOP prosedur penyusunan dokumen rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "unmet need"
 81. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelaksanaan pelayanan KB
 82. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat peduli KB dan KB pria
 83. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan pemantauan tingkat drop-out peserta KB
 84. SOP prosedur penyusunan dokumen pengembangan materi penyelenggaraan jaminan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB
 85. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB pada klinik swasta
 86. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi remaja

87. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
88. SOP prosedur penyusunan dokumen penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan murah
89. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana alat obat, cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan
90. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan penjaminan ketersediaan alat obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB mandiri
91. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan informed choise dan informed concent dalam program KB
92. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, supervisi pelaksanaan program KB nasional
93. SOP prosedur penyusunan dokumen penyusunan rumusan penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/aids, IMS dan bahaya Napza
94. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan pik remaja di sekolah dan luar sekolah
95. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan kesatuan pramuka saka kencana di sekolah dan luar sekolah
96. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan egiatan perencanaan usia pernikahan dan melahirkan
97. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan pembinaan penyuluh KB
98. SOP prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan pelayanan KRR dan genre dalam pencegahan HIV/aids, IMS dan bahaya Napza
99. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan kemitraan pelaksanaan KRR, pencegahan HIV/aids, IMS dan bahaya napza baik antara sektor pemerintah dengan sektor

lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM)

100. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengendalian reproduksi remaja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas
101. SOP penyusunan dokumen rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan advokasi dan penggerakan PLKB
102. SOP penyusunan dokumen perumusan kebijakan penetapan pengembangan advokasi dan penggerakan PLKB
103. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan operasional advokasi dan penggerakan plkb
104. SOP penyusunan dokumen perumusan kebijakan penetapan kriteria advokasi dan penggerakan plkb
105. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan penggerakan plkb
106. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan advokasi, kie dan konseling, program kb dan krr
107. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan kie ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan instansi program kb
108. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pemanfaatn prototipe program kb/kesehatan reproduksi (kr), krr, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan kekuarga kecil
109. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis, teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama
110. SOP penyusunan dokumen penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB
111. SOP penyusunan dokumen penyediaan dukungan operasional penyuluh KB
112. SOP penyusunan dokumen penyediaan dukungan operasional ipkb dalam program KB nasional
113. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pembinaan teknis IPKB dalam program KB nasional
114. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam

rangka kemandirian

115. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional dan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian
116. SOP penyusunan dokumen nalisis data dalam penetapan kebijakan pemda untuk peningkatan kualitas hidup perempuan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
117. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pug di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya
118. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan sdm dan pelatihan keterampilan
119. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
120. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas peran pusat study wanita (PSW), LSM, pemerhati perempuan dan dunia usaha
121. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin
122. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender (kie pug)
123. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terkait bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, lingkungan dan sosial budaya
124. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pengembangan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat melalui kegiatan up2k pkk
125. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan

penguatan kelembagaan

126. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan persiapan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka mengembangkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penguatan kelembagaan
127. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak perkembangan program peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan penguatan kelembagaan
128. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan persiapan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan pemda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan
129. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan pendidikan, kesejahteraan dan perlindungan perempuan
130. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan
131. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pengendalian dan pemantauan adanya trafficking (perdagangan manusia) dan kekerasan terhadap perempuan
132. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi masyarakat/lsm terhadap perempuan
133. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan analisis, perencanaan anggaran terhadap pemberdayaan, kesejahteraan dan perlindungan perempuan
134. SOP penyusunan dokumen penyelenggaraan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan dan tenaga kerja perempuan
135. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program pemberdayaan perempuan
136. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan persiapan bahan

A F

- koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan
137. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan terhadap dampak dan perkembangan program pemberdayaan perempuan
 138. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, lingkungan dan sosial budaya
 139. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan persiapan dan menganalisis data dalam penetapan kebijakan pemda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, perlindungan anak
 140. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan penyusunan program perlindungan anak dalam rangka peningkatan pendidikan, kesejahteraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
 141. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan terhadap anak
 142. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pengendalian dan pemantauan adanya trafficking (perdagangan manusia) dan kekerasan terhadap anak
 143. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi masyarakat/lsm terhadap anak
 144. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan analisis, perencanaan anggaran terhadap pemberdayaan, kesejahteraan dan perlindungan anak
 145. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan dan tenaga kerja anak
 146. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan implementasi program perlindungan anak
 147. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan persiapan bahan koordinasi dengan komponen terkait dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
 148. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program serta pelaporan

terhadap dampak dan perkembangan program perlindungan anak

149. SOP penyusunan dokumen pelaksanaan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup anak dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, lingkungan dan sosial budaya

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

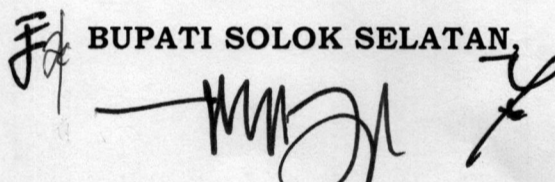
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018


BUPATI SOLOK SELATAN,
MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR : 17